



**EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN MIGRASI PENYIARAN
ANALOG KE DIGITAL DI INDONESIA
(Studi Kasus Kebijakan Penentuan Lembaga Penyiaran
Penyelenggara Penyiaran Multipleksing dan Implikasinya bagi Lembaga
Penyiaran Swasta Lokal di Semarang)**

TESIS

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
Pendidikan Strata 2
Program Magister Ilmu Komunikasi
Universitas Diponegoro**

Penyusun

Nama : Made Dwi Adnjani

NIM : 14030111400004

**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Made Dwi Adnjani
NIM : 14030111400004
Program Studi : Kebijakan Media Angkatan IV Magister Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya susun dengan judul :

Ekonomi Politik Kebijakan Migrasi Penyiaran Analog ke Digital di Indonesia (Studi Kasus Kebijakan Penentuan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing dan Implikasinya bagi Lembaga Penyiaran Swasta Lokal di Semarang)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan plagiat dari tesis atau karya ilmiah orang lain, dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Diponegoro maupun universitas lainnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, 1 Mei 2013

Pembuat Pernyataan,

Made Dwi Adnjani
NIM 14030111400004

**UNIVERSITAS DIPONEGORO
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA**

**HALAMAN PENGESAHAN
TESIS**

**EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN MIGRASI PENYIARAN ANALOG
KE DIGITAL DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Kebijakan Penentuan Lembaga Penyiaran Penyelenggara
Penyiaran Multipleksing dan Implikasinya bagi Televisi Lokal di Semarang)**

**Disusun oleh :
Made Dwi Adnjani
NIM 14030111400004**

Telah disetujui untuk diujikan di depan Tim Penguji

Semarang,

Pembimbing

**Dr.Turnomo Rahardjo
NIP. 19601030 198703 1 001**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Made Dwi Adnjani
NIM : 1403011100004
Program Studi : Kebijakan Media
Judul Tesis : Ekonomi Politik Kebijakan Migrasi Penyiaran Analog ke Digital di Indonesia (Studi Kasus Kebijakan Penentuan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing dan Implikasinya bagi Lembaga Penyiaran Swasta Lokal di Semarang)

Pembimbing

**Dr.Turnomo Rahardjo
NIP. 19601030 198703 1 001**

Ketua Program Studi

**Dr.Sunarto
NIP. 19660727 199203 1 001**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Made Dwi Adnjani
NIM : 14030111400004
Program Studi : Kebijakan Media
Judul Tesis : Ekonomi Politik Kebijakan Migrasi Penyiaran Analog ke Digital di Indonesia (Studi Kasus Kebijakan Penentuan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing dan Implikasinya bagi Lembaga Penyiaran Swasta Lokal di Semarang)

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Tesis Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Mei 2013
Waktu : pukul 10.00 wib
Tesis dinyatakan : LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Pembimbing : Dr. Turnomo Rahardjo (.....)
Ketua Sidang : Dr. Kushandajani (.....)
Sekretaris Sidang : Triyono Lukmantoro, S.Sos, M.Si (.....)
Penguji : Dr. Sunarto (.....)

MOTTO

La ilaa ha-ilallah

Hidup adalah perpindahan dari satu fase ke fase lainnya, jadi hidupilah dengan antusias dan sepenuh kesadaran serta jadikan "sabar" dan "syukur" perisaimu.

Di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan ketekunan. Bakat pun tidak, sebab ada sebagian banyak orang yang gagal meskipun berbakat. Pendidikan juga tak mampu menggantikannya, dunia ini penuh dengan orang berpendidikan yang gagal. Hanya ketekunan dan kebulatan tekadlah yang tak terkalahkan. (Colvin Coolidge)

Batu ujian keunggulan intelegensi adalah kemampuan pikiran untuk mencakup dua ide berlawanan pada saat bersamaan, namun tetap mampu berfungsi.

(The Crack-Up – F.Scott Fitzgerald)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan untuk:

Keluargaku tercinta,

Ibu dan Bapak I. Njoman Djiwa, yang mengajarkan ketegaran dan kesabaran dalam menjalani hidup.

Kakak I. Gede Esa Kurniawan dan Adik I. Nyoman Triyasa yang membuatku menyadari bahwa menjadi diri sendiri adalah yang terbaik

Suamiku Edi Sukanto yang membuatku memahami bahwa kasih sayang, ketulusan dan kesetiaan ada dalam diri lelaki

Ketiga ksatria Mujahidku, Reyhan Fernanditya Anangga Pradhana, Rafnandito Humam Baihaqi dan Raditya Rifan Zaidan yang membuat hidup ini penuh warna dan dipenuhi rasa syukur

Kampus Tempatku Mengabdi,

Yang membuatku bersyukur menjadi bagian dari visi luhur Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Almamater dan Guru-guruku yang terhormat,

Yang membuatku berterimakasih atas kesempatan menjadi pribadi pembelajar

Sahabat dan rekan-rekanmu,

yang turut mewarnai perjalanan hidupku.....hidup ini sunyi tanpa kalian.....

Insan-Insan kritis,

yang peduli pada pengetahuan, keadilan dan kejujuran dan menginginkan perubahan pada kehidupan berbangsa dan bernegara

Semua yang tidak abadi,

yang pada akhirnya abadi juga dalam kenangan.....

ABSTRAK

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan program migrasi dari teknologi analog ke teknologi digital pada penyiaran televisi sejak tahun 2008. Sebagai anggota dari *International Telecommunication Union* (ITU) maka Indonesia melakukan migrasi analog ke digital secara bertahap dan ditargetkan pada tahun 2018 seluruh wilayah Indonesia sudah menggunakan teknologi *digital broadcasting*. Persoalan yang mengemuka dari kebijakan ini adalah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free to air*) yang melahirkan kebijakan penentuan LP3M dan LP3S. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan semangat Undang-Undang Penyiaran sehingga DPR meminta pemerintah untuk menghentikan kebijakan penentuan ini hingga DPR mengesahkan revisi UU Penyiaran. Mantan praktisi media televisi yang tergabung dalam *Institute of Community and Media Development* (Incode) juga telah mendaftarkan permohonan uji materi peraturan TV digital pada tanggal 23 Juli 2012 ke Mahkamah Agung (MA) Jakarta.

Fenomena tersebut di atas dikaji dengan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan paradigma kritis untuk memahami bagaimana dinamika pergulatan ekonomi politik dalam proses implementasi kebijakan migrasi penyiaran analog ke digital, dan bagaimana implikasinya bagi televisi lokal khususnya dalam mensejajarkan diri dengan televisi swasta nasional sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LP3M). Teori yang digunakan adalah teori ekonomi politik dan strukturasi Anthony Giddens. Hasil temuan penelitian adalah terdapat dinamika ekonomi politik dalam kebijakan migrasi penyiaran analog digital, yang dibuktikan dengan tidak adanya ruang bagi demokratisasi penyiaran televisi melalui Peraturan Menteri Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011. Digitalisasi penyiaran yang seharusnya memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menata sistem penyiaran agar lebih demokratis, ternyata hanya melanggengkan dominasi lembaga penyiaran swasta nasional. Kebijakan yang melahirkan penentuan LP3M dan LP3S adalah kebijakan yang dinilai cacat hukum prosedural dan bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002. Adapun Implikasi kebijakan migrasi penyiaran ini bagi lembaga penyiaran swasta lokal di Semarang adalah adanya aset yang mubazir karena pemancar analog yang dimiliki tidak akan bisa digunakan lagi, ketentuan sewa yang memberatkan bagi televisi lokal karena melahirkan relasi yang timpang atau asimetris dalam struktur ekonomi politik dan sosial. Termarginalisasinya televisi lokal menyebabkan tidak memiliki *bargaining position* yang kuat sebagai penyewa pada lembaga penyiaran swasta nasional yang memiliki izin sebagai LP3M, *diversity of ownership* dan *diversity of content* di era digital tidak mungkin terjadi karena hanya dikuasai oleh kelompok pemilik modal besar.

Kata kunci : migrasi penyiaran, *digital broadcasting*, *free to air*.

ABSTRACT

The government through ministry communication and informatics has launched program migration from analog technology to digital technology on broadcasting television since 2008. As member of the international telecommunication union (ITU) then Indonesia do migration from analog to digital broadcasting gradually and targeted in 2018 the entire territory of Indonesia is already using digital technology broadcasting. Issues emerging from this policy is the Government Regulation number 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 about The Digital TV Broadcasting Terrestrial Reception free to air that gave the policy determination LP3M and LP3S. This policy is considered to be contrary to the spirit of the broadcasting legislation, so that the DPR called on the Government to stop the policy until the House of Representatives endorsed revisions to the broadcasting legislation. Former television media practitioners who are members of the Institute of Community and Media Development (Incode) has also registered the application for digital TV rules material test or judicial review on July 23, 2012 to the Supreme Court (MA).

Qualitative research uses descriptive case study approach with critical paradigm is purpose to understand how the dynamics of political economy strife in the process of migration policy implementation analogue to digital broadcasting, and how its implications for local television in particular to align themselves with the national private television as Broadcasting Organizers Multiplexing (LP3M). The theory used are a political economy theory and theory of Structuration Anthony Giddens. Results of the research findings is the lack of space for the democratization of television broadcasting through Ministerial Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011. Digitization of broadcasting that should give the opportunity to the Government to organize the broadcasting system to make it more democratic, it turns out only perpetuate the dominance of national private broadcasters even implementation of this policy will be able to turn off local and community broadcasting. Government Regulation that gave to the policy determination LP3M and LP3S, is assessed as flawed procedural law and contrary to the Broadcasting Act No. 32/2002. Policy implications of migration of this broadcasting for local private broadcasters in Semarang is the existence of redundant assets because the analog transmitter will not be used again, the provisions of the lease are damning for the local television asymmetrical relationship in political and socio-economic structure, and because of marginalization, local television has no bargaining position as a tenant at LP3M, diversity of ownership and diversity of content will not exist more in digital era because of the power domination from large capital owner.

Key word : broadcasting migration, digital broadcasting, free to air.

KATA PENGANTAR

Regulasi adalah sesuatu yang tidak bebas nilai karena di dalam proses pembuatannya pasti terdapat tarik menarik kepentingan yang kuat antara kepentingan publik, pemilik modal dan pemerintah. Isu yang kontroversial dalam kebijakan pemerintah khususnya berkaitan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah masalah digitalisasi penyiaran. Regulasi tentang migrasi penyiaran yang dikeluarkan pemerintah berusaha menstimulus keikutsertaan berbagai pihak di dunia penyiaran serta membuka peluang industri baru dan memaksimalkan kapasitas spektrum frekuensi dengan teknologi digital. Namun pada kenyataannya, regulasi yang ada belum mampu mengatur dunia penyiaran yang terlanjur karut marut. Momen migrasi penyiaran analog ke digital yang seharusnya menjadi saat yang tepat untuk memperbaiki karut marut yang terjadi selama ini ternyata terperangkap pada kepentingan ekonomi politik dan dominasi pada kelompok-kelompok bisnis besar.

Fenomena dominasi lembaga penyiaran swasta nasional bermodal besar, di satu sisi dianggap tak terhindarkan, ketika situasi global menghendaki upaya yang mengarah kepada konsolidasi dan konvergensi dalam bisnis media modern yang membutuhkan biaya besar. Namun di sisi lain, dominasi lembaga penyiaran padat modal juga menimbulkan sejumlah paradoks berkaitan dengan fungsi media sebagai ruang publik dengan sejumlah fungsi sosial yang melekat di dalamnya dan juga termarginalisasinya televisi lokal. Fenomena kebijakan media tidak bisa lepas dari struktur ekonomi politik dan *interplay* antara struktur dan agensi.

Oleh karena itu, segala puji hanya bagi Allah s.w.t. pelimpah cahaya ilmu yang terbenar, sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan, pilar nalar dan ilham, yang telah meringankan langkah untuk menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Ekonomi Politik Kebijakan Migrasi Penyiaran Analog ke Digital di Indonesia (Studi Kasus Kebijakan Penentuan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing dan Implikasinya bagi Lembaga Penyiaran Swasta Lokal di Semarang)”. Tesis ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata-2 pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro.

Menempuh pendidikan S2 di Mikom Undip merupakan perjuangan panjang yang serasa tidak akan berakhir, namun akhirnya mencapai ujung perjalanan juga. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk seluruh keluarga besar yang selalu memberikan *support*. Prof. Laode M. Kamaluddin, selaku Rektor Unissula, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan lagi, Dr Sunarto selaku Ketua Program Mikom, Dr. Turnomo Rahardjo selaku pembimbing tesis yang tekun mengedit kata-kata. Seluruh dosen dan staf Mikom (Mbak Febri, Mbak Eti, Mbak Heni, Mas Priyo, Mas Totok, Mas Adi, Mas Topik dan Mas Rosyid), teman-teman angkatan-4 Kebijakan Media (Ali, Anita, Mutia, Isti, Ruth dan Sinung "kompak sampai akhir"), rekan-rekan Fikom Unissula (Endang, Mubarok, Mbak Dian dan Mbak Tri) dan rekan-rekan S2 Mikom (terutama Uniek, Rekno, Mbak Mumuk terimakasih untuk dukungannya. Angkatan-5 komstrat yang selalu memberi semangat). Seluruh informan penelitian dan nara sumber diskusi (Pak Nyoman Winata, Pak Liliek, Pak Ario, Pak Riyanto, Pak Judhariksawan, Mas Arie, Prof. Laode, Dr. Henry S, Pak Yuliman, dan juga TL). Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terimakasih. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran, kritik dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Semarang, April 2013
Penulis

Made Dwi Adnjani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN ABSTRACT	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Signifikansi Penelitian	16
1.4.1. Signifikansi Akademis	16
1.4.2. Signifikansi Praktis	16

1.4.3. Signifikansi Sosial	17
1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis	17
1.5.1. Paradigma Penelitian	17
1.5.2. <i>State of The Art</i>	23
1.5.3. Kajian Ekonomi Politik	27
1.5.4. Teori Strukturasi Anthony Giddens	39
1.5.5. Regulasi Penyiaran	42
1.5.6. Televisi dan Perkembangan Televisi Lokal	50
1.6. Asumsi Penelitian	52
1.7. Operasionalisasi Konsep	53
1.7.1. Kebijakan Migrasi Penyiaran Analog ke Digital.....	53
1.7.2. Penyiaran Multipleksing.....	54
1.7.3. Lembaga Penyiaran Multipleksing.....	54
1.8. Metoda Penelitian	54
1.8.1. Tipe Penelitian	54
1.8.2. Situs Penelitian	58
1.8.3. Subjek Penelitian.....	58
1.8.4. Jenis Data	60
1.8.5. Sumber Data	60
1.8.6. Teknik Pengumpulan Data	60
1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data	62
1.8.8. Kualitas Data Penelitian	66
1.9. Keterbatasan Penelitian	67

BAB II.KEBIJAKAN PENYIARAN DAN MIGRASI PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL DI INDONESIA

2.1. Deskripsi Historis Penyiaran di Indonesia	69
2.2. Lembaga Penyiaran Swasta Nasional di Indonesia	80
2.3. Lembaga Penyiaran Swasta Lokal	93
2.3.1. Cakra Semarang TV	98
2.3.2. TVKU	99
2.3.3. Pro TV Semarang.....	100
2.3.4. Borobudur TV	100
2.4. Deskripsi Historis Migrasi Penyiaran Analog ke Digital	102
2.4.1. Tren Penyiaran Digital	102
2.4.1.1. Jepang	105
2.4.1.2. Eropa	108
2.4.1.3. Australia	110
2.4.1.4. Malaysia	110
2.4.1.5. Korea Selatan	111
2.4.1.6. Kamboja	112
2.4.2. Penggunaan Teknologi TVD-TT di Indonesia	113
2.4.3. Layanan TVD-TT	116
2.4.4. Wilayah Penyelenggaraan TVD-TT	116
2.4.4.1. Wilayah Jangkau Siaran atau Wilayah Layanan (<i>service area</i>)	116

2.4.4.2. Wilayah Cakupan (<i>coverage area</i>)	117
2.4.4.3. Zona layanan	117
2.4.5. Rantai Produksi Penyiaran TVD-TT	118
2.4.6. Peta Jalan (<i>road map</i>) Teknologi Penyiaran Digital	119
2.4.7. Model Bisnis Layanan TVD-TT	122
2.4.8. Ketentuan Layanan TVD-TT	127
2.4.9. Rantai Layanan TVD-TT	128
2.4.10. Teknologi Siaran TVD-TT	130

BAB III. LEMBAGA PENYIARAN SWASTA LOKAL DALAM KEBIJAKAN MIGRASI PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL

3.1. Kebijakan Migrasi Penyiaran Analog ke Digital di Indonesia	135
3.1.1. Tuntutan Dunia Internasional	136
3.1.2. Aturan Teknis Kebijakan Migrasi Penyiaran.....	138
3.1.3. Sosialisasi Kebijakan	141
3.1.4. Kesesuaian dengan UU Penyiaran	143
3.2. Kebijakan Penentuan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing	146
3.2.1. Dominasi Penyiaran Swasta Nasional	148
3.2.2. Persyaratan yang Memberatkan	154
3.2.3. Potensi Monopoli Usaha	156
3.3. Implikasi Kebijakan Bagi Televisi Lokal	160
3.3.1. Implikasi Positif Kebijakan Migrasi Penyiaran	160

3.3.2. Implikasi Negatif Kebijakan Migrasi Penyiaran	162
--	-----

BAB IV. EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN MIGRASI PENYIARAN ANALOG

KE DIGITAL

4.1. Ekonomi Politik Kebijakan Migrasi Penyiaran Analog ke Digital	166
4.1.1. Kebijakan yang Tergesa-gesa	173
4.1.2. Kebijakan Tanpa Sosialisasi Maksimal	177
4.1.3. Kebijakan yang Cacat Hukum	181
4.2. Ekonomi Politik Kebijakan Penentuan Lembaga Penyiaran Multipleksing	189
4.2.1. Keterbukaan yang Semu	191
4.2.2. Dominasi Lembaga Penyiaran Swasta Nasional	197
4.2.3. Potensi Monopoli Usaha	199
4.3. Implikasi Kebijakan Migrasi Penyiaran Analog ke Digital bagi Televisi Lokal...	204
4.4. Interaksi Kekuasaan Seputar Kebijakan Migrasi Penyiaran Analog Digital	209

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	215
5.2. Implikasi Penelitian	216
5.2.1. Implikasi Akademis	216
5.2.2. Implikasi Praktis	217
5.2.3. Implikasi Sosial	220
5.3. Rekomendasi Penelitian	221

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penyelenggara Televisi Digital di 5 Zona sebagai LP3M	11
Tabel 1.2. Situasi-situasi Relevan untuk Strategi yang Berbeda	58
Tabel 2.2. Jangkauan LPS Televisi Swasta.....	90
Tabel 2.3. Peta Kepemilikan Stasiun Televisi	91
Tabel 2.4. Jumlah Televisi Lokal di Indonesia	94
Tabel 2.5. Perubahan dalam Migrasi DVB-T ke DVB-T2	115
Tabel 2.6. Rantai Layanan TVD-TT	128
Tabel 4.1. Pokok-pokok Dominasi Pemerintah dalam Digitalisasi Penyiaran	186

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Analisis data model interaktif Miles dan Haberman	65
Diagram 2.1	Berdirinya Stasiun Swasta Nasional	88
Gambar 2.1.	Standar Penyiaran digital di dunia saat ini.....	103
Gambar 2.2.	Peta Dunia Transisi Penyiaran Analog ke Digital	104
Gambar 2.3.	Perbedaan Teknologi Penyiaran Analog dan Digital pada Televisi	113
Gambar 2.4.	Rantai Produksi TVD-TT	118
Gambar 2.5.	Perkembangan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia	121
Gambar 2.6.	Rantai Nilai (<i>Value Chain</i>) Bisnis Penyelenggaraan Televisi Digital	123
Gambar 2.7.	Model Bisnis Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial di Indonesia	125
Bagan 4.1.	Sistem Penyiaran yang Demokratis	189

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. *Media Policy Anatomy in Indonesia*
- Lampiran 2. Penggolongan Lembaga Penyiaran
- Lampiran 3. Koding Data Penelitian
- Lampiran 4. Logika Penjodohan Pola
- Lampiran 5. Alur Skema Kebijakan Penyiaran Analog ke Digital
- Lampiran 6. Hasil Wawancara Informan 1
- Lampiran 7. Hasil Wawancara Informan 2
- Lampiran 8. Hasil Wawancara Informan 3
- Lampiran 9. Hasil Wawancara Informan 4
- Lampiran 10. Hasil Wawancara Informan 5
- Lampiran 11. Hasil Wawancara Informan 6
- Lampiran 12. Permen No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011
- Lampiran 13. Permen No. 23/PER/M.KOMINFO/11/2011
- Lampiran 14. Permen No. 05/PER/M.KOMINFO/2/2012
- Lampiran 15. Kepmen No. 95/KEP/M.KOMINFO/02/2012